

**KOMUNIKASI ANTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PINRANG DENGAN KONSTITUEN PADA DAERAH
PEMILIHAN DI KECAMATAN PATAMPANUA PERIODE
2014-2015**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

HERWIN

Nomor Stambuk: 105640142111

K e p a d a

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Komunikasi Antara Anggota DPRD
Kabupaten Pinrang Dengan Konstituen
Pada Daerah Pemilihan di Kecamatan
Patampanua Periode 2014-2015

Nama Mahasiswa : Herwin
Nomor Staobul : 105640142111
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd.

Dr. H. Amir Muaddin, M.Si.

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Mublis Madani, M.Si.

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si.

PENERIMAAN TIM PENILAI

Telah diterima oleh Tim Penilai Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Sk Rektorat Nomor: 1235/ESP.A.I-VIII/VI/37/2016 sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Di Makassar

Pada Hari Selasa, Tanggal 30 Agustus 2016

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. H. Muhtis Madani, M.Si
NBM : 696 063


Drs. H. Muhammad Idris, M.Si
NBM : 782 643

Penguji :

1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

(.....)

2. Drs. Alimuddin Said, M.Si


(.....)

3. Abdul Kadir Adys, SH, MM


(.....)

4. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Herwin**
Nomor Stambuk : 105640142111
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Juni 2016

Yang Menyatakan,

Herwin
NIM. 105640142111

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah S.W.T, atas Rahmat dan Taufik-Nya jualah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Komunikasi Politik Antara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Dengan Konstituen Pada Daerah Pemilihan Di Kecamatan Patampanua Periode 2014-2015.” dapat diselsaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Bapak **Drs. H. Ansyari Mone M.Pd** sebagai Pembimbing I dan **Drs. H. Amir Muhiddin, M.Si** sebagai Pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Doa semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan Penghargaan dan Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Irwan Akib, M.Pd, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya, beliau telah berperan sebagai orang tua akademik bagi saya.
4. Bapak Drs. H. Mappigau Samma, M.Si selaku Penasehat Akademik dan juga beliau telah berperan sebagai orang tua akademik saya.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta Alm. P. Katutu, dan terkhusus kepada ibu saya P. Moncong terima kasih atas segala bimbingan, kasih sayang yang tulus, jasa dan pengorbanannya sepanjang masa sehingga skripsi ini bisa saya kerjakan dengan baik, penghargaan, simpuh dan sujud serta doa semoga Allah SWT memberinya umur panjang, kesehatan dan selalu dalam lindungannya, dan kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan motivasi serta arahan-arahan selama penulis menempuh pendidikan sampai pada penyelesaian skripsi ini.
7. Orang tua Kedua saya bapak Drs. H. Alimin, M.Si dan ibu Hj. A. Rahmawati yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, support, serta mendukung

baik secara moril maupun materi sehingga saya bisa menyelesaikan studi S1 ini, terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada saya selama ini semoga Allah melimpahkan kesehatan dan rejeki yang sangat melimpah kepada beliau.

8. Buat saudara-saudariku tercinta Munturiani, Muliati, Milawati, Herul, dan Hendrik yang selalu memberikan dukungan, semangat lewat celoteh dan candaanya.
9. Buat Adnan Rifai, Samira Musa, Nasriani Dian Pratiwi dan EX.6 Smansa Pinrang yang selalu setia menemani, memberikan masukan, bantuan dan semangat dalam melengkapi data penelitian penulis ditengah kesibukannya.
10. Buat sahabat saya Surgaya Ningsih, Taufik Hidayat, Akmal Reza Amri teman-teman angkatan 011 IP, Komunitas JALUR, yang tiada henti memberi semangat, dorongan dan dukungan dalam penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi saya ini.
11. Buat senior dan junior yang ada di HIMJIP terima kasih atas dukungannya selama ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan atas bantuan serta bimbingan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahuwataala. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, Juni 2016

Herwin

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Penerimaan Tim Penilai	iii
Halaman Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Komunikasi Politik	9
B. Elit Politik Dalam Komunikasi di Indonesia	17
C. Kerangka Pikir	19
D. Fokus Penelitian	20
E. Deskripsi Fokus Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
B. Jenis dan Tipe Penelitian	22
C. Sumber Data	22
D. Informan Penelitian	23
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data	24
G. Pengabsahan Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskriptif Objek Penelitian	28

B. Bentuk Komunikasi Anggota DPRD Kabupaten Pinrang	42
C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Komunikasi Politik Antara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Dengan Konstituen	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dalam sistem politik yang amat penting. Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik dan pada waktu yang sama ia juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output sistem politik itu. Melalui komunikasi politik rakyat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap sistem politik. Melalui itu pula rakyat mengetahui apakah dukungan, aspirasi, dan pengawasan itu tersalur atau tidak sebagaimana dapat mereka simpulkan dari berbagai kebijakan politik yang diambil.

Barangkali itulah sebabnya mengapa para ahli ilmu politik menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah komunikasi politik. Melalui pengkajian atas masalah komunikasi politik kiranya akan dapat ditemukan salah satu ukuran yang amat penting untuk mengetahui sifat dan kualitas suatu sistem politik.

Sebagaimana diketahui, semakin sehat dan semakin tinggi kualitas komunikasi politik yang hadir dalam suatu sistem politik memberi petunjuk bahwa sifat dan kualitas demokrasi sistem politik itu juga semakin sehat dan tinggi. Kita mengetahui pula bahwa bangsa-bangsa yang hidup dalam sistem politik yang demokratis, tidak pernah berhenti mempersehat dan meningkatkan kualitas komunikasi politik mereka, sebagaimana mereka tidak pernah istirahat

dalam menyempurnakan dan mempertinggi kualitas sistem politik demokrasi mereka dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Hal ini disebabkan karena realita kehidupan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan dinamika perkembangan zaman. Dari masa ke masa sejumlah fakta obyektif baru akan muncul, sedangkan sejumlah faktor obyektif lama akan menghilang atau tidak begitu relevan lagi. Dengan demikian, terjadinya berbagai pembaruan itu tidak terelakkan, sehingga penyempurnaan dan peningkatan kualitas sistem politik termasuk komunikasi politiknya sangat diperlukan.

Pola hubungan komunikatif demokratis dalam suatu sistem komunikasi politik merupakan pola yang senantiasa berubah-ubah. Artinya peranan elit dan masyarakat dalam sistem itu tidak mesti tetap dan berkesinambungan, tapi dapat berubah dari satu situasi ke situasi yang lain. Dalam satu situasi kaum elit merupakan sumber suatu pesan, tetapi pada kesempatan lain masyarakat dapat saja menjadi sumber pesan. Sedangkan di dalam masyarakat yang berideologi otoritarian akan memperlihatkan pola komunikasi yang tidak berkembang secara baik dan dinamis. Ini disebabkan kelompok elit dengan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya senantiasa memaksakan keinginan atau kebijakan-kebijakannya tanpa memperhatikan nilai-nilai serta aspirasi masyarakat. Sehingga masyarakat secara tetap dan berkesinambungan hanya menjadi pihak penerima saja. Dalam keadaan seperti inilah hubungan kelompok elit dengan masyarakat sering terganggu dan buntu, yang ada pada akhirnya menimbulkan konflik politik (Suryadi:1993:24).

Perubahan sistem politik yang terjadi melalui proses reformasi telah membawa perubahan dalam tatanan pemerintahan. Dimana unsur-unsur dari sistem politik memberikan tuntutan untuk melakukan perubahan menuju tatanan sistem politik yang demokratis. Hal ini terjadi dikarenakan selama ini sistem demokrasi pada dasarnya tidak dilaksanakan oleh pemerintah terdahulu. Salah satu agenda yang penting dalam melakukan perubahan politik adalah menyelenggarakan pemilu. Makna pemilu yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukan perebutan kekuasaan (pengaruh) yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi elit politik (pergantian kekuasaan) dapat dilakukan secara damai dan beradab.

Di negara-negara yang melaksanakan sistem demokrasi, pemilu merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Rakyat menjadi pihak yang menentukan dalam proses politik dengan memberikan suara mereka secara langsung. Melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara tidak langsung rakyat dapat melakukan pertukaran pemerintahan dengan jalan damai berdasarkan peraturan yang telah disepakati. Rakyat merupakan elemen penting dalam melakukan pergantian kepemimpinan nasional. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme yang jelas dalam mengatur kekuasaan rakyat ini.

Pemilihan umum merupakan salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan siapa yang akan memimpin

mereka dalam lembaga eksekutif. Pemilihan umum juga wadah untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Dari era kepemimpinan Habibie sistem pemilu mengalami perubahan-perubahan. Pada era Habibie pemilu pada tahun 1999 dilakukan dengan mekanisme pemilih memilih partai, yang kemudian partai yang menentukan orang-orang yang akan duduk mewakili para pemilihnya. Kemudian perubahan terjadi pada pemilu 2004 era Megawati Soekarnoputri dimana rakyat sebagai pemilih diberi kesempatan untuk langsung memilih wakilnya untuk duduk sebagai wakil mereka dengan lebih sedikit campur tangan dari partai politik. Hal ini menyebabkan rakyat menjadi elemen penting dalam pemilu terutama partisipasi dalam memilih wakilnya. Pelaksanaan pemilu ini akan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan perubahan ke arah yang lebih baik begitu pula di era pemerintahan yang berlansung sekarang ini.

Dengan perubahan sistem pemilu yang lebih menuntut partisipasi masyarakat maka diharapkan wakil yang terpilih nantinya benar-benar yang sesuai dengan keinginan masyarakat, karena selama ini masyarakat menganggap lembaga perwakilan tidak memperlihatkan kinerja sebagai perwakilan yang memperjuangkan nasib mereka. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem demokrasi dalam artian pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka Indonesia mempunyai lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah. Adanya lembaga tersebut merupakan penjelmaan dari seluruh

rakyat Indonesia yang berdaulat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia.

Lembaga perwakilan tersebut harus dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan ini harus dibuktikan oleh setiap anggota legislatif dalam hubungannya dengan rakyat. Anggota legislatif mempunyai kewajiban untuk bertemu dengan konstituennya untuk berkomunikasi. Dalam menjalankan tugasnya seorang wakil rakyat harus tahu dengan apa yang diinginkan oleh konstituen yang diwakilinya. Banyak cara yang harus dilakukan oleh wakil rakyat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya dengan melakukan komunikasi antara keduanya. Melakukan komunikasi dengan konstituennya adalah hal wajib yang tak bisa dielakkan oleh wakil rakyat. rakyat berhak menyampaikan apa yang diinginkan kepada wakil rakyat untuk diperjuangkan dalam sebuah kebijakan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang merupakan wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi rakyat melalui forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang selama periode 2014-2019. Namun, partisipasi dan komunikasi politik aktif dilakukan hanya terjadi pada tahap awal dalam suatu mekanisme sistem politik yakni ketika para elit politik menyampaikan berbagai agenda penting apabila telah terpilih menjadi wakil rakyat. Namun, setelah proses demokratis melalui pemilihan umum tersebut selesai, kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pinrang justru tidak diperjuangkan karena bentuk komunikasi politik antara anggota DPRD Kabupaten Pinrang dengan konstituen di daerah pemilihannya khususnya di Kecamatan

Patampanua tidak efektif sehingga saluran dan medium komunikasi antara elit dan masyarakat tidak dapat tersalurkan dengan baik.

Setiap tahunnya, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang menggunakan dan memanfaatkan waktu untuk turun ke konstituen masing-masing dengan menggunakan masa reses. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencitraan diri dengan cara berkomunikasi dan menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing, serta berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam bentuk kebijakan (Peraturan Daerah) baik terkait dengan anggaran dan lain-lain. Masa reses merupakan agenda rutin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang Periode 2014-2019. Selain itu, reses juga menjadi sesuatu yang ditunggu para wakil rakyat. Selain jadi waktu istirahat, masa reses juga dapat dimanfaatkan untuk bertemu keluarga jauh maupun dekat di kampung halaman dan bisa juga dimanfaatkan untuk bertemu dengan masyarakat di daerah pemilihannya khususnya konstituen di Kecamatan Patampanua, namun komunikasi politik antara elit dan rakyat tersebut hanya sebagai langkah pencitraan politik.

Aspirasi atas kebutuhan dan permasalahan masyarakat Kecamatan Patampanua yang sejatinya diselesaikan melalui pendekatan politis yakni dibidang pendidikan dan kesejahteraan sosial pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan baik karena kurangnya komunikasi politik aktif yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Pinrang dengan konstituen di daerah pemilihannya, Kegiatan-kegiatan komunikasi politik dilakukan hanya bernuansa formal dan tidak begitu banyak aspirasi dan permasalahan rakyat yang ditindaklanjuti oleh

Anggota DPRD Kabupaten Pinrang khususnya di daerah pemilihan Kecamatan Patampanua.

Dengan dasar dan pertimbangan tersebut, untuk mengkaji lebih jauh komunikasi politik antara elit politik dengan masyarakat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Pinrang dengan konstituennya yang diangkat dalam judul Proposal Penelitian “*Komunikasi Politik Antara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Dengan Konstituen Pada Daerah Pemilihan di Kecamatan Patampanua Periode 2014-2015*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bentuk komunikasi apa saja yang paling dominan digunakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pinrang dengan Konstituen?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat komunikasi politik antara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang dengan Konstituen pada Daerah Pemilihannya di Kecamatan Patampanua Periode 2014-2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk komunikasi politik yang paling dominan digunakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pinrang dengan Konstituen pada Daerah Pemilihannya di Kecamatan Patampanua Periode 2014-2015.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat komunikasi politik antara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang dengan Konstituen pada Daerah Pemilihan di Kecamatan Patampanua Periode 2014-2015.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada peneliti pada khususnya dan pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan pada umumnya dalam hal ini yang berkaitan dengan komunikasi politik serta sebagai bahan referensi pembandingan bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti tentang proses komunikasi politik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan serta referensi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan komunikasi politik yang efektif dan efisien dengan konstituen di daerah pemilihan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Komunikasi Politik

1. Pengertian Komunikasi Politik

Dalam ilmu politik, istilah komunikasi politik masih relatif baru Almond dalam Arifin (1993:32) berpendapat bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda. Arti penting sumbangan pemikiran Almond terletak pada pandangannya bahwa semua sistem politik yang pernah ada di dunia ini, yang ada sekarang, dan yang akan ada nanti mempunyai persamaan-persamaan yang mendasar, yaitu adanya kesamaan fungsi yang dijalankan oleh semua sistem politik.

Sedangkan McNair menyebutkan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang diupayakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Kemudian Graber memandang bahwa komunikasi politik adalah proses pembelajaran, penerimaan, dan persetujuan atas kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan, struktur, dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik (Arifin:2011:26).

Selain itu, Astrid dalam Arifin (2011:32) mengartikan komunikasi politik sebagai suatu komunikasi yang diarahkan pada pencapaian pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi itu, dan mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh

lembaga-lembaga politik. Dengan demikian, melalui kegiatan komunikasi politik terjadi pengaitan masyarakat sosial dengan lingkup Negara sehingga komunikasi politik merupakan sarana untuk pendidikan politik / kesadaran warga dalam hubungan kenegaraan.

Justru itu dalam uraian dimuka, Arifin (2011:39) menyimpulkan bahwa komunikasi politik pembicaraan untuk memengaruhi dalam kehidupan bernegara. Kemudian Mueller dalam Arifin (2011:44) merumuskan komunikasi politik sebagai hasil yang bersifat politik dari kelas sosial, pola bahasa, dan pola sosialisasi. Sedang Plano dalam Arifin (2011:56) menuliskan bahwa komunikasi politik merupakan proses penyebaran arti, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi sistem politik. Bahkan Galnoor dalam Arifin (2011:51) menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yaitu suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial dimana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran. Selanjutnya Rush dan Althoff dalam Arifin (2011:59) dengan ringkas menyatakan bahwa komunikasi politik adalah unsur dinamis sistem politik.

2. Fungsi Komunikasi Politik

Bertolak dari pengertian dan pemaknaan komunikasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar bagi semua interaksi manusia, termasuk didalamnya interaksi kelompok. Oleh sebab itu, komunikasi dikatakan memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia, sehingga fungsi komunikasi adalah mencapai tujuan peran tersebut, yaitu antara lain : (Hasan: 2005:31)

- a. Mencapai pengertian satu sama lain;
- b. Membina kepercayaan;
- c. Mengkoordinir tindakan;
- d. Merencanakan strategi;
- e. Melakukan pembagian pekerjaan;
- f. Melakukan aktivitas kelompok; dan
- g. Berbagi rasa.

Selain itu komunikasi memiliki empat fungsi utama dalam suatu organisasi atau dalam kelompok tertentu, yaitu : (Hasan : 2005:49)

1. Fungsi pengawasan,
2. Fungsi motivasi,
3. Fungsi pengungkapan emosional, dan
4. Fungsi informasi.

Selanjutnya, komunikasi politik juga memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam setiap sistem sosial. Menurut A.W. Widjaja (1993:28) fungsi komunikasi politik dalam setiap sistem sosial meliputi beberapa hal berikut :

1. Informasi : pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.
2. Sosialisasi (pemasyarakatan) : penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat

yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.

3. Motivasi : menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.
4. Perdebatan dan diskusi : menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik.

3. Tujuan Komunikasi Politik

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam komunikasi politik diantaranya : (Arifin: 2011:42)

1. Citra Politik

Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membentuk citra politik yang baik pada khalayak. Citra politik itu terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media sosial dan media massa yang bekerja menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Justru itu citra politik merupakan salah satu efek dari komunikasi politik dalam paradigm atau perspektif mekanis, yang pada umumnya dipahami sebagai esan yang melekat dibenak individu atau kelompok. Meskipun demikian citra itu dapat berbeda dengan realitas yang sesungguhnya atau tidak merefleksikan kenyataan objektif.

2. Opini publik

Selain citra politik, komunikasi politik juga bertujuan untuk membentuk dan membina opini publik serta mendorong partisipasi politik, sebagaimana yang telah disinggung di muka. Bahkan, dapat dikatakan bahwa citra politik dan opini publik merupakan konsekuensi-konsekuensi dari proses komunikasi politik yang bersifat mekanistik.

3. Partisipasi politik dan kebijakan politik

Komunikasi politik, sosialisasi politik, citra politik, pada akhirnya menuju pada sasaran dan tujuan, yaitu terciptanya partisipasi politik dan keikutsertaan dalam proses penetapan kebijakan politik. Partisipasi politik atau partisipasi rakyat terhadap agenda-agenda politik, sangat penting dalam demokrasi (*the cornerstone of democracy*), terutama dalam demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Keikutsertaan khalayak atau rakyat dalam kegiatan politik terutama dalam memberikan suara dalam pemilihan umum dan memengaruhi kebijakan publik, merupakan konsekuensi atau efek komunikasi politik yang sangat penting. Hal itu merupakan studi tentang efektivitas komunikasi atau komunikasi politik yang menjadi pusat perhatian dalam paradigma mekanistik. Komunikasi politik yang tidak menghendaki terjadinya efektivitas akan merupakan komunikasi yang tidak bertujuan.

4. Pemilihan Umum

Salah satu tujuan komunikasi politik yang sangat penting adalah memenangkan pemilu (pemilihan umum). Sukses tidaknya komunikasi

politik yang efektif adalah diukur dari jumlah suara yang diperoleh melalui pemilu yang bersih, bebas, langsung dan rahasia. Dalam hal itu, tidak terdapat intimidasi atau politik uang (*money politics*) secara sistematis, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat massal.

4. Strategi Komunikasi Politik

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam komunikasi politik diantaranya : (Arifin: 2011:87)

1. Ketokohan dan kelembagaan

Langkah pertama dalam strategi komunikasi politik, ialah merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya, ketokohan seseorang politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam komunikasi politik. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode dan memilih media politik yang tepat.

2. Menciptakan kebersamaan

Langkah strategis kedua yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi politik adalah menciptakan kebersamaan antara politikus dan khalayak (rakyat) dengan cara mengenal khalayak dan menyusun pesan yang homofili. Hal itu diperlukan agar komunikator politik dapat melakukan empati (pribadi khayal atau pribadi luwes). Oleh karena itu dalam menciptakan kebersamaan diperlukan strategi dalam memahami khalayak dan menyusun pesan persuasive serta menetapkan metode dan memilih media.

3. Membangun konsensus

Langkah strategi ketiga yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi politik yaitu membangun konsensus baik antara para politikus dan dalam satu partai politik maupun antara para politikus dari partai yang berbeda. Hal itu pada umumnya terjadi baik pada rapat dan persidangan maupun dalam lobi dengan menggunakan model komunikasi interaktif sesuai dengan paradigma interaksional. Suasana dialogis harus dibangun melalui penciptaan kebersamaan atau homofili dengan melakukan empati sebagaimana telah diuraikan di depan. Hal itu dimaksudkan agar semua pihak memiliki rasa memiliki sehingga dapat berpartisipasi secara aktif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan seni berkompromi dan bersedia membuka diri.

5. Bentuk Komunikasi Politik

Dalam arti yang paling sederhana, komunikasi politik merupakan kontak antara wakil dan konstituennya. Kontak politik ini merupakan hubungan di antara berbagai pikiran yang hidup dalam masyarakat. Kontak politik antara wakil dan konstituennya ini biasanya memperlihatkan bentuk-bentuk tertentu pula.

Untuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk komunikasi politik, A.W Widjaja (1993:56) membaginya ke dalam tiga kelompok yaitu :

1. Komunikasi personal

Komunikasi yang ditujukan kepada sasaran yang tunggal, bentuknya dapat berupa : anjang sana, tukar pikiran dan sebagainya. Komunikasi personal

efektifitasnya paling tinggi karena komunikasinya timbal balik dan terkosentrasi.

2. Komunikasi kelompok

Komunikasi yang ditujukan kepada kelompok yang tertentu. Kelompok adalah suatu kumpulan manusia yang mempunyai antar hubungan sosial yang nyata dan memperlihatkan struktur yang nyata pula. Bentuk komunikasi ini adalah : ceramah, briefing, indoktrinasi, penyuluhan dan sebagainya.

3. Komunikasi massa

Komunikasi yang ditujukan kepada massa atau komunikasi yang menggunakan media massa. Massa disini adalah kumpulan orang-orang yang hubungan antar sosial tidak jelas dan tidak mempunyai struktur tertentu.

Dalam melakukan komunikasi politik terhadap konstituen di daerah pemilihannya, anggota DPRD menjalankannya dalam bentuk komunikasi politik seperti berikut : (Dan Nimmo : 2004:65)

1. Bentuk komunikasi interpersonal

Merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu. Kegiatannya meliputi dialog/tatap muka antara anggota DPRD dengan konstituennya. Dialog/tatap muka merupakan bentuk komunikasi yang efektif karena bisa berlangsung timbal balik dan setiap pelaku komunikasi tersebut bisa leluasa menyampaikan ide-ide, dan keinginan-keinginan mereka tanpa dibatasi oleh jarak.

2. Bentuk komunikasi organisasi

Menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak. Kegiatannya meliputi reses dan penyuluhan yang dilakukan oleh anggota DPRD dengan tema yang disesuaikan dengan permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat.

B. Elit Politik dalam Komunikasi Politik di Indonesia

1. Sistem Politik dan Komunikasi Politik Indonesia

Syamsu Suryadi dalam Rauf dan Nasrun (1993:28) bahwa Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang tidak liberal tetapi juga tidak otoriter. Demokrasi pancasila ialah demokrasi yang mengambil prinsip-prinsip demokrasi yang baik dan benar dari demokrasi liberal dan demokrasi totaliter, lalu digabung dan diramu dengan prinsip-prinsip demokrasi yang bersendi pada kepribadian bangsa Indonesia. Maka demikianlah pola komunikasi politik Indonesia, mengambil unsur-unsur yang baik dan benar dari kedua pola yang dikemukakan tadi, kemudian digabung dan diramu dengan unsur-unsur budaya komunikasi bangsa Indonesia. Meskipun demikian, kita belum bisa menegaskan apa pola komunikasi politik Indonesia, kecuali menyetujui istilah komunikasi politik yang berdasarkan demokrasi pancasila.

Satu konsep barangkali bisa menggambarkan pola komunikasi politik demokrasi pancasila, yaitu konsep kebebasan yang bertanggung jawab. Konsep ini lahir dari elit politik, tetapi sudah diterima oleh kalangan masyarakat luas sebagai suatu konsep politik yang mencerminkan demokrasi pancasila (Rauf dan Nasrun: 1993:37).

2. Elit Politik dalam Sistem Komunikasi Politik Indonesia

Dengan menggambarkan pola-pola komunikasi politik berdasarkan sifat dari sistem politiknya, maka kita sudah bisa memahami atau paling tidak meraba-raba, pola komunikasi politik Indonesia. Dengan pola itu, akan terlihat bagaimana proses komunikasi politik berlangsung, baik proses komunikasi secara vertical yakni antara masyarakat dengan elit politik, maupun proses komunikasi secara horizontal yakni antara elit politik dengan elit politik yang berada dalam struktur politik (Asep Saeful: 2008:45).

Kembali ke soal sistem, sistem komunikasi politik kita secara vertikal terdiri dari elit politik, media massa dan masyarakat; masing-masing merupakan subsistem yang berfungsi secara sumber (komikator), khalayak penerima (komunikan), dan suatu proses yang dikenal sebagai umpan balik. Jadi peranan elit sebagai komunikator politik sangat dominan, terutama menyangkut propaganda politiknya. Pesan-pesan politik dibuat atau direkayasa sedemikian rupa untuk membentuk opini masyarakat. Beberapa bentuk perekayasaannya yang dapat dijadikan contoh antara lain adalah kasus kebulatan tekad, masalah suksesi, keterbukaan, demokrasi, rekrutmen politik dan retorika-retorika politik lainnya yang berbau propaganda. Mungkin saja masyarakat tidak menyadari atau mungkin sama sekali belum tahu bahwa informasi-informasi dan pesan-pesan politik yang diterimanya adalah hasil rekayasa, bukannya sesuatu yang benar-benar merupakan *political will* dari elit politik (Asep Saeful: 2008:53).

Elit politik lokal (para elit yang memerintah di tingkat daerah) merupakan bagian dari elit politik nasional yang memegang peranan penting dalam proses

komunikasi politik , khususnya secara vertikal. Posisi elit lokal sesungguhnya adalah perantara / jembatan antara elit politik di tingkat pusat dengan masyarakat umum.

C. Kerangka Pikir

Komunikasi politik antara anggota DPRD dengan konstituen adalah suatu bentuk komunikasi antara wakil rakyat (legislatif) dengan konstituen pemilih (rakyat) dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi politik rakyat dalam perumusan kebijakan publik. Seharusnya komunikasi politik yg dilakukan Anggota DPRD (Dan Nimmo:2004:65) ada dua yaitu Bentuk komunikasi interpersonal, adalah bentukan dari hubungan satu kepada satu. Kegiatannya meliputi dialog/tatap muka antara anggota DPRD dengan konstituennya. Dialog/tatap muka merupakan bentuk komunikasi yang efektif karena bisa berlangsung timbal balik dan setiap pelaku komunikasi tersebut bisa leluasa menyampaikan ide-ide, dan keinginan-keinginan mereka tanpa dibatasi oleh jarak. Kemudian Bentuk komunikasi organisasi, adalah menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak. Kegiatannya meliputi reses dan penyuluhan yang dilakukan oleh anggota DPRD dengan tema yang disesuaikan dengan permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Selain itu tentunya dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yaitu pendukung, adalah hal-hal yang menjadi pendukung komunikasi politik anggota DPRD dengan konstituen berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan dan juga faktor penghambat, adalah hal-hal atau masalah yang menjadi

penghambat proses komunikasi politik anggota DPRD dengan konstituen di Kabupaten Pinrang.



D. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Bentuk Komunikasi Politik Anggota DPRD Kab. Pinrang terdiri dari komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi dalam rangka melahirkan partisipasi politik konstituen terhadap perumusan kebijakan politik.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi politiknya antara anggota DPRD dengan konstituen adalah suatu bentuk komunikasi antara wakil rakyat (legislatif) dengan konstituen pemilih (rakyat) dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi politik rakyat dalam perumusan kebijakan publik.
2. Bentuk komunikasi interpersonal adalah bentukan dari hubungan satu kepada satu. Keegiatannya meliputi dialog tatap muka atau *face to face*, dialog interaktif antara anggota DPRD dengan konstituennya. Merupakan bentuk komunikasi yang efektif karena bisa berlangsung timbal balik dan setiap pelaku komunikasi tersebut bisa leluasa menyampaikan ide-ide, dan keinginan-keinginan mereka tanpa dibatasi oleh jarak.
3. Bentuk komunikasi organisasi adalah menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak. Keegiatannya meliputi reses dan penyuluhan dilakukan oleh anggota DPRD dengan tema yang disesuaikan dengan permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat.
4. Faktor pendukung yaitu adalah hal-hal yang menjadi pendukung komunikasi politik anggota DPRD dengan konstituen berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan.
5. Faktor penghambat adalah hal-hal atau masalah yang menjadi penghambat proses komunikasi politik anggota DPRD dengan

konstituen Kabupaten Pinrang seperti kurangnya partisipasi konstituen dan kurangnya waktu luang Anggota DPRD terhadap konstituen.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Patampanua. Waktu penelitian mulai pada tanggal 05 Maret 2016 s/d 05 Mei 2016. Dengan dasar dan pertimbangan bahwa wilayah atau daerah tersebut kurang terjalin komunikasi politik antara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang dengan konstituen sehingga aspirasi dan permasalahan masyarakat tidak tersalur dan terwujud dalam bentuk kebijakan publik (Peraturan Daerah).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode yang memiliki beberapa perspektif teori yang dapat mendukung penganalisisan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau fenomena yang terjadi di tempat penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dijarah dari sumber data primer dan data sekunder dengan proposisi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer, adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjarah berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder, adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap layak dan mengetahui tentang komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Pinrang dengan konstituennya di daerah pemilihan Kecamatan Patampanua.

Adapun informan penelitian berjumlah 9 orang yang terdiri dari:

Table.3.1

Nama-nama informan penelitian sebagai berikut:

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Mansur	MS	Anggota DPRD Kabupaten Pinrang	1 Orang
2	Kasman	KM	Anggota DPRD Kabupaten Pinrang	1 Orang
3	Kent Mukti Ali	KMA	Camat Patampanua	1 Orang
4	Rivaldy Yusri Putra	RYP	Lurah Teppo	1 Orang
5	Andi Ilham	AI	Lurah Tonyamang	1 Orang
6	Abbas Paduai	AP	Kepala Desa Leppangan	1 Orang
7	Dharman Sandrego	DS	Masyarakat	1 Orang
8	Hasanuddin	HN	Masyarakat	1 Orang
9	Samrah	SR	Masyarakat	1 Orang
Jumlah				9 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dengan melalui teknik ini penulis mengadakan pengamatan pelaksanaan komunikasi politik antara anggota DPRD Kabupaten Pinrang Daerah Pemilihan Kecamatan Patampanua Periode Reses 2014-2015 dengan masyarakat pemilih atau konstituen untuk kemudian dilakukan penelitian.

2. Wawancara

Teknik ini dimaksudkan dengan mengadakan wawancara mendalam (*indepth interview*) secara langsung terhadap informan yang dianggap dapat memberikan keterangan-keterangan yang lebih lengkap serta mampu membahas dengan tuntas tentang permasalahan yang berkaitan dengan erat dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengetahui secara konseptual tentang permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti dengan membaca literature khususnya yang berhubungan dengan komunikasi anggota DPRD Kab. Pinrang terhadap konstituennya

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehinggadoatanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan anticipatory sebelum

melakukan reduksi data, setelah data direduksi makalangkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, Flowchart, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai komunikasi politik anggota DPRD terhadap konstituen pada daerah pemilihannya

G. Pengabsahan Data

Adapun untuk menguji keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, terdapat tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh di lapangan melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang

Gambaran umum Kabupaten Pinrang mencakup sejarah kabupaten Pinrang, Peta wilayah Kabupaten Pinrang, visi - misi Kabupaten Pinrang

a. Sejarah Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 km² dan berpenduduk sebanyak ±347.684 jiwa.

Asal Muasal Pemberian nama pinrang ada dua versi cerita yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi pertama menyebut Pinrang berasal dari bahasa bugis yaitu kata "benrang" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti "rawa-rawa", hal ini disebabkan oleh karena pada awal pembukaan daerah Pinrang yang tepatnya saat ini di pusat kota kabupaten Pinrang, masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa.

Versi kedua menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh karena suatu ketika Raja Sawitto yang bernama La Paleteang bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa berkat bantuan To barani pole' Kassa disambut gembira oleh rakyatnya, namun mereka terheran-heran karena wajah sang raja berubah dan mereka berkata "pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa" yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa, maka setelah itu rakyat mulai

menyebut daerah tersebut sebagai Pinrayang artinya berubah kemudian berubah penyebutan menjadi Pinrang.

Kabupaten Pinrang, cikal bakalnya berasal dari Onder Ofdeling Pinrang yang berada di bawah afdeling Pare-Pare yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi self bestuur atau swapraja yaitu KASSA, BATULAPPA, SAWITTO, dan SUPPA yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan Massenrengpulu (Kassa dan Batulappa) dan Ajatappareng (Suppa dan Sawitto), ini merupakan bagian dari adu domba Kolonial untuk memecah persatuan di Sulawesi Selatan.

Pemilihan nama Pinrang sebagai nama wilayah dikarenakan daerah pinrang merupakan tempat berkumpulnya ke empat raja tadi dan sekaligus tempat berdirinya kantor *onder afdelingeen* (kantor residen). Selanjutnya Onder afdeling Pinrang ini, pada zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang, kemudian pada zaman kemerdekaan pada akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang.

b. demografi

Secara keseluruhan jumlah penduduk di kecamatan Patampanua yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada yang berjenis kelamin laki-laki, hal ini tercermin dari penguraian tabel dibawah ini;

No	Kecamatan	Jumlah desa/kel	Jumlah penduduk		Jumlah	Jumlah kk
			Laki-laki	Perempuan		
1	Lembang	14	21.294	22.386	43.680	14.104
2	Duampanua	14	23.771	5.869	11.608	16.369
3	Batulappa	5	5.739	27.482	53.414	3.649
4	Watang Sawitto	8	25.932	20.624	40.492	18.460
5	Paleteang	6	19.868	13.361	26.669	13.969
6	Tiroang	5	13.308	18.372	35.528	8.242
7	Patampanua	11	17.156	9.516	18.494	11.922
8	Cempa	7	8.978	16.046	31.081	6.211
9	Mattiro Sompe	9	15.035	15.259	29.423	10.353
10	Mattiro Bulu	9	14.164	16.319	31.559	9.958
11	Lanrisang	10	15.240	10.018	19.318	10.686
12	Suppa	7	9.300	25.110	48.881	6.649
Jumlah		105	189.785	200.362	390.147	130.572

Penduduk Kabupaten pinrang berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang berjumlah 367.340 jiwa atau sekitar 3,1 % Luas Wilayah Daratan Sulawesi Selatan yang tersebar di 12 kecamatan, dengan kepadatan Penduduk adalah 170 Jiwa per-Km² yang terdiri dari:

- Laki-laki = 189.785 jiwa
- Perempuan = 200.362 jiwa
- Jumlah kepala keluarga = 130.147 jiwa

d. Visi Misi Kabupaten Pinrang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pinrang yang merupakan rencana Tahap kedua (2014-2019) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2009 - 2029), diindikasikan sebagai tahap peletakan dan penguatan dasar-dasar menuju kemandirian daerah yang bertumpu pada kemampuan bidang pertanian dalam arti luas. Rencana tahap pertama ini, dapat dikategorikan sebagai Tahap Konsolidasi yang menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Pada sisi lain, berbagai isu Nasional dan Daerah, yang berimplikasi pada isu daerah Kabupaten Pinrang, seperti kesejahteraan masyarakat, pemerataan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan, peluang kerja, perkembangan kawasan cepat tumbuh, pengembangan kawasan pantai, lingkungan hidup, perbaikan pendidikan, kualitas kesehatan, perbaikan gizi, kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia, dll, perlu mendapat perhatian serta antisipasi bersama, yang kesemuanya perlu didukung oleh para pelaku pembangunan di kabupaten Pinrang. Sebagaimana diketahui bahwa pernyataan rencana pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pinrang adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis Melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kehidupan, Dan Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional”

Terkait Dengan rencana pembangunan Jangka Panjang diatas serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, aspirasi dan cita-cita masyarakat, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Pinrang, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat, maka visi yang hendak diwujudkan melalui pencapaian target strategis dalam 5 (tlima) tahun mendatang, dirumuskan kedalam Visi :

"Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Penataan Program Pembangunan Pro Rakyat menuju Terciptanya Kawasan Agropolitan Yang Didukung Oleh Penerapan Prinsip Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Visi tersebut, terintegrasi dengan Visi pembangunan Nasional dan bagian integral dari Visi pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan, didasarkan pada perubahan paradigma serta kondisi yang ada, memerlukan keterukuran dan komitmen berkelanjutan. Harapan tersebut, menuntut adanya Akselerasi pencapaian Visi kedepan, yang diharapkan dapat lebih berperan dalam percepatan perkembangan internal wilayah.

Berkaitan dengan permasalahan, peluang dan kondisi obyektif perkembangan daerah kedepan, maka untuk mewujudkan visi pembangunan kabupaten pinrang, secara garis besar diformulasikan kedalam 3 (tiga) kluster rumusan misi, yaitu kluster misi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang kemasyarakatan.

2. Gambaran Umum Kecamatan Patampanua

Gambaran umum Kecamatan Patampanua mencakup letak geografis dan luas wilayah kecamatan patampanua, keadaan penduduk dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, dan struktur organisasi pemerintahan kecamatan patampanua.

1. Letak geografis dan luas wilayah

Secara geografis Kecamatan Patampanua memiliki luas wilayah terletak pada lintang selatan $4^{\circ} 10' 30'' - 30^{\circ} 1' 13''$, bujur timur $119^{\circ} 26' 30'' - 119^{\circ} 47' 20''$ dengan luas wilayah $136,85 \text{ km}^2$ merupakan salah satu dari 12 (dua belas) kecamatan di kabupaten Pinrang yang terletak kurang lebih 13 Km ke arah utara Ibu Kota Kabupaten Pinrang. Kecamatan Patampanua merupakan tanah datar 85% dan gunung 15% dengan kemiringan 10,5%, ketinggian lahan berkisar 600 M di atas permukaan laut dengan pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk pertanian dan perkebunan sebagaimana merupakan penghasilan utama masyarakat kecamatan patampanua dan sebagiannya lagi merupakan perumahan penduduk dan prasarana penduduk seperti gedung perkantoran pemerintah dan swasta serta pertokoan.

Di kecamatan Patampanua sebagian besar daerah pertanian dan peternakan terkonsentrasi pada 4 Kelurahan dan 7 Desa yakni :

1. Kelurahan Teppo;
2. Kelurahan Benteng;
3. Kelurahan Tonyamang;

4. Kelurahan Maccirinna;
5. Desa Mattiro Ade;
6. Desa Leppangang;
7. Desa Pincara;
8. Desa Sipatuo;
9. Desa Malimpung;
10. Desa Padang Loang dan Desa Masolo

Adapun batas wilayah Kecamatan patampanua yaitu:

Utara : Kecamatan Batulappa dan Kecamatan Duampanua

Timur : Kabupaten Sidrap

Selatan: Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang

Barat : Kecamatan Cempa

2. Keadaan penduduk dan potensi yang dimiliki

Kecamatan Patampanua terdiri atas 4 kelurahan dan 7 Desa dengan jumlah penduduk berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kabupaten Pinrang Tahun 2014 adalah ± 34.640 jiwa dengan perbandingan 16.348 jiwa Laki-laki dan 18.292 jiwa Perempuan serta Kepadatan Penduduk 4.066 Jiwa/Km². Penduduk Kecamatan Patampanua pada umumnya hidup rukun dan damai yang mayoritas beragama Islam yakni 34.296 orang dan selebihnya terdapat 245 orang non Islam dengan jumlah fasilitas rumah Ibadah 51 buah masing-masing 38 buah Masjid, 12 buah Mushalla, dan 1 buah Gereja sehingga kehidupan beragama nampak jelas mewarnai interaksi sosial di daerah ini.

1. Potensi Sosial

- a. Adat tradisional leluhur dan budaya saling tolong menolong (gotong royong) yang merupakan ciri khas budaya masyarakat yang menjadi modal dalam rangka pembangunan daerah.
- b. Peranan informal leader, yaitu kepemimpinan tokoh masyarakat di lingkungan Kecamatan Patampanua yang merupakan potensi social yang dapat menjadi mediator pembangunan masyarakat.

2. Potensi Ekonomi

- a. Tersedianya tanah dan lahan yang dapat dipergunakan untuk berbagi pembangunan ekonomi.
- b. Potensi pertanian khususnya tanaman pangan, peternakan terpadu, perikanan darat serta perdagangan dan jasa yang mulai berkembang.
- c. Potensi Pengairan untuk irigasi, kelistrikan, dan air minum dengan aliran sungai Saddang.

3. Struktur organisasi pemerintah kecamatan patampanua

Kantor Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 20 tahun 2008 maka ditetapkan susunan organisasi Kantor Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan
6. Seksi Perekonomian
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang didukung oleh sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Jumlah dan komposisi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Kantor Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang disajikan berikut ini:

**Tabel Jumlah Pegawai dalam Lingkup Kantor Kecamatan Patampanua
Kabupaten Pinrang Tahun 2014**

No.	Uraian	Gol.				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Camat Patampanua	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Seksi	-	-	5	-	5
4	Sub Bagian	-	-	3	-	3
5	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
6	Staf	-	9	7	1	17
Jumlah		-	9	13	3	25

**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dalam
Kantor Kecamatan Patampanua
Kabupaten Pinrang Tahun 2014**

No.	Uraian	Gol.				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Doktoral	-	-	-	-	-
2	Magister	-	-	-	3	3
3	Sarjana	-	-	10	-	10
4	Diploma	-	1	1	-	2
5	SLTA	-	8	2	-	10
6	SLTP	-	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-	-
Jumlah		-	9	13	3	25

**Jumlah Pegawai Menurut golongan per jenis kelamin dalam
Kantor Kecamatan Patampanua
Kabupaten Pinrang Tahun 2014**

No.	Uraian	Gol.				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-Laki	-	5	10	2	17
2	Perempuan		4	3	1	8
	Jumlah	-	9	13	3	25

Adapun Visi dan misi Kantor Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dirumuskan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Terpilih periode 2014-2019 hasil pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) yang merupakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pinrang. Visi tersebut adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Penataan Program Pembangunan Pro Rakyat Menuju Terciptanya Kawasan Agropolitan yang Didukung oleh Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”***. Dengan mengacu pada visi tersebut dan dengan mempertimbangkan hasil analisis situasi dan kondisi internal serta eksternal termasuk budaya dan tata-nilai dalam masyarakat, maka visi Kantor Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dirumuskan sebagai berikut :

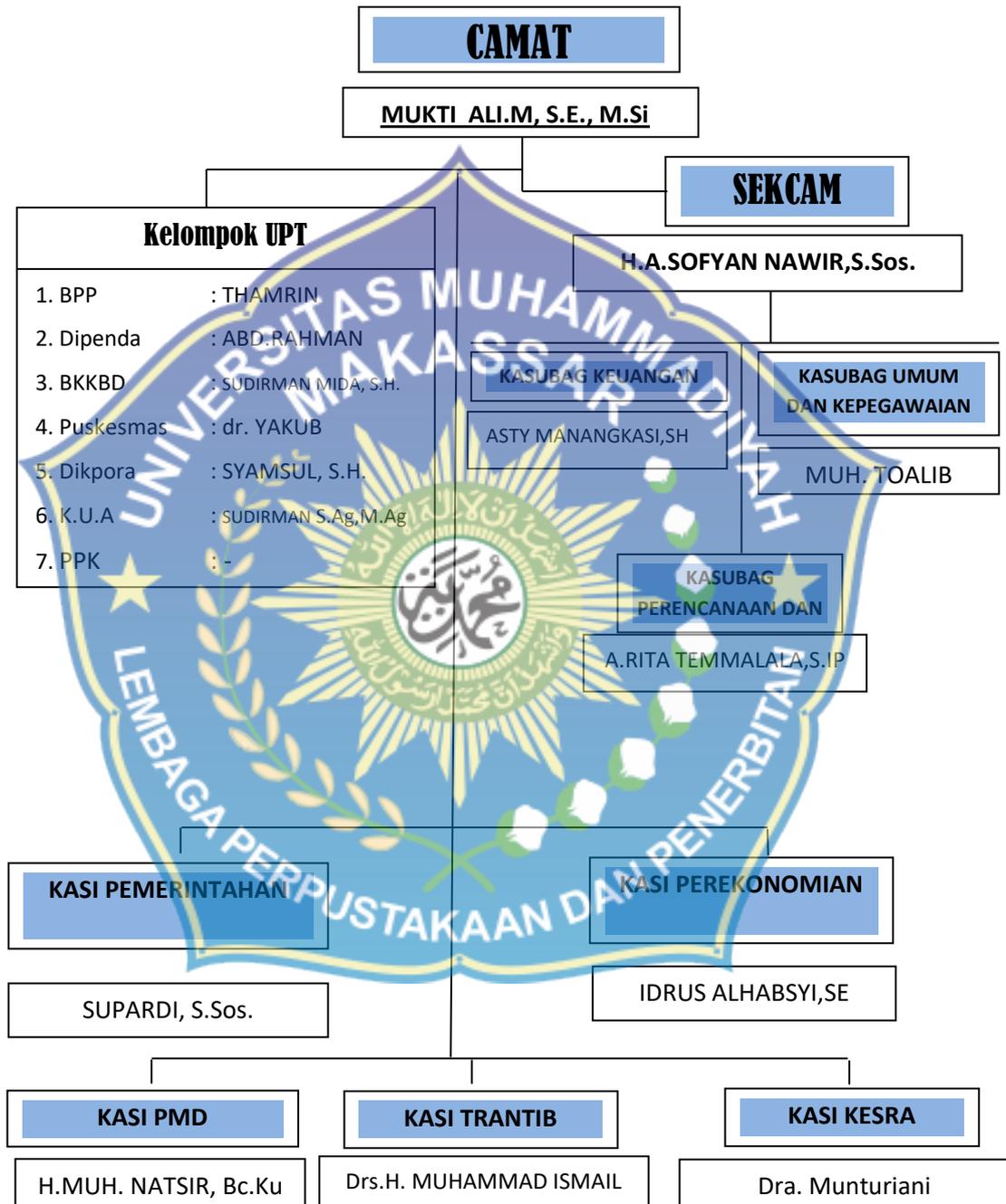
“Terwujudnya Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Pembangunan Disegala Bidang Yang Didukung Oleh Kinerja Dan Kompetensi Aparatur Yang Akseptabel Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kecamatan Patampanua Berswasembada Pangan / Mandiri Pangan .”

Misi Kantor Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dirumuskan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan manajemen public melalui pemberian layanan cepat dan tepat sasaran serta terjangkau
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan ruang kota yang nyaman, tertib dan sehat bagi aktivitas warga
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka optimalisasi sektor pertanian sebagai andalan kabupaten dan sektor-sektor sosiasal ekonomi lainnya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas melalui pembelajaran serta mengasah kepekaan agar senantiasa dapat memberi layanan yang selaras dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan masyarakat.
5. Mendorong tumbuhnya nilai-nilai agama sebagai nilai utama tatanan masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN PATAMPANUA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 tahun 2008



B. Bentuk Komunikasi Anggota DPRD Kabupaten Pinrang

Di negara-negara yang melaksanakan sistem demokrasi, pemilu merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Rakyat menjadi pihak yang menentukan dalam proses politik dengan memberikan suara mereka secara langsung. Melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara tidak langsung rakyat dapat melakukan pertukaran pemerintahan dengan jalan damai berdasarkan peraturan yang telah disepakati. Rakyat merupakan elemen penting dalam melakukan pergantian kepemimpinan nasional. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme yang jelas dalam mengatur kekuasaan rakyat ini.

Pemilihan umum merupakan salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. Pemilihan umum juga wadah untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokratis tengah berlangsung di Indonesia. Pemilu 1999 dan pemilu 2004 telah menghasilkan kepemimpinan baru, lembaga tidak lagi didominasi oleh partai tunggal, dan proses pengambilan keputusan di DPR berlangsung lebih transparan, bahkan media dapat meliput rapat-rapat DPR secara langsung dan terbuka. Dengan kondisi seperti itu, masyarakat lebih memahami keberadaan dan kegiatan DPR. Di sisi lain, sebagai wakil rakyat anggota Dewan diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Untuk itu anggota Dewan selama ini menjaring aspirasi yang berkembang

melalui beberapa cara, misalnya penyampaian aspirasi secara langsung di DPR, hasil pengumpulan pendapat umum, dan kunjungan ke lapangan.

Meski telah menempuh berbagai cara, seringkali keputusan yang diambil oleh DPR belum mampu mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Ini mencerminkan belum efektifnya informasi yang berasal dari masyarakat sebagai sebuah masukan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Karenanya, penjangkaran aspirasi masyarakat perlu lebih diefektifkan dengan melibatkan anggota DPR secara langsung. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk maksud tersebut adalah mengefektifkan kegiatan anggota DPR selama masa reses melalui dialog-dialog langsung dengan berbagai elemen masyarakat. Belum mapannya sistem politik di Indonesia memang menumbuhkan keyakinan bahwa tidak akan ada sanksi politik secara langsung yang akan didapat oleh para anggota DPR.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk selalu memberi perhatian kepada masyarakat pemilihnya baik secara personal maupun secara organisasi atau kelompok dengan memperhatikan hubungan emosional ataupun komunikasi politik yang mereka bangun. Dengan demikian segala bentuk permasalahan serta aspirasi dari masyarakat dapat tersalurkan dengan baik sehingga menghasilkan perumusan kebijakan yang menjadi skala prioritas bagi masyarakat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang merupakan wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi rakyat melalui forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pinrang selama periode 2014-2019. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD kabupaten Pinrang mempunyai kewajiban untuk selalu memberi perhatian kepada masyarakat pemilihnya baik secara personal maupun secara organisasi atau kelompok dengan memperhatikan hubungan emosional ataupun komunikasi politik yang mereka bangun karena anggota dewan harus mengerti apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian segala bentuk permasalahan serta aspirasi dari masyarakat dapat tersalurkan dengan baik sehingga menghasilkan perumusan kebijakan yang menjadi skala prioritas bagi masyarakat.

Pada kesempatan-kesempatan tertentu, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang menggunakan dan memanfaatkan waktu untuk turun ke konstituen masing-masing dengan menggunakan berbagai bentuk komunikasi seperti face to face/tatap muka, melakukan dialog interaktif dengan masyarakat dan juga berbagai bentuk komunikasi lainnya seperti melakukan kunjungan kerja dan turun langsung ke masyarakat atau reses dan melakukan penyuluhan. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencitraan diri, dengan cara berkomunikasi dan menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing, serta berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam bentuk kebijakan (Peraturan Daerah) baik terkait dengan anggaran dan lain-lain. Dari berbagai macam bentuk komunikasi tersebut ada yang dilakukan secara spontanitas seperti pertemuan-pertemuan yang tidak formal dan ada juga yang telah menjadi agenda rutin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang pada periode 2014-2019. Dari segala kegiatan-kegiatan tersebut yang dilakukan oleh anggota dewan juga menjadi sesuatu yang ditunggu para konstituen atau masyarakat pemilih karena

melalui kegiatan tersebut segala bentuk aspirasi dan permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada anggota dewan sebagai wakil daripada rakyat yang nanti ditindak lanjuti sebagai acuan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat yang ada di kecamatan patampanua.

1. Komunikasi Interpesonal

Kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya merupakan tanggungjawab moral dan politis sebagai wakil daripada masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam menjaring aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sering dilaksanakan. Dalam pelaksanaan komunikasi politik yang terjadi untuk menjaring aspirasi ini berupa tatap muka dan melakukan dialog.

Komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal, bentuk komunikasi interpersonal merupakan salah satu dari beberapa bentuk komunikasi yang sering digunakan oleh para anggota dewan ketika sedang berhadapan dengan para konstituen pemilihnya. Menurut salah satu anggota DPRD kabupaten pinrang dapil II dari Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan bahwa :

“secara pribadi komunikasi saya dengan konstituen di kecamatan patampanua karena saya mempunyai basis tertentu di kecamatan tersebut khususnya di empat desa dan kelurahan yang menjadi backup kekuatan saya tentunya saya bangun dengan pendekatan-pendekatan yang mengarah pada hubungan emosional yg mana mereka luapkan dalam berbagai pertemuan-pertemuan baik pada acara formal maupun non formal,” (wawancara dengan informan MS, tanggal 29 maret 2016)

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Pinrang dari Partai

Gerindra bahwa :

“Dalam perumusan kebijakan aspirasi masyarakat sangat diperlukan, oleh karena itu kami selaku pemangku kebijakan kami senantiasa bertemu langsung dengan masyarakat untuk menyerap tiap aspirasinya agar arah kebijakan yang dibuat betul-betul menjadi kebutuhan dari masyarakat” (wawancara dengan informan KM, tanggal 2 april 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa komunikasi yang digunakan oleh anggota dewan yaitu melakukan pendekatan-pendekatan emosional yang nantinya tidak menjadikan kedua belah pihak menjadi canggung dalam melakukan perumusan-perumusan kebutuhan masyarakat. Betapa pentingnya komunikasi diadakan antara anggota dewan dengan masyarakat sebagai konstituennya untuk mengetahui apa-apa kebutuhan serta permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat serta sebagai acuan untuk melakukan kebijakan yang betul-betul merupakan kebutuhan masyarakat. Komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD merupakan kontak antara wakil dan konstituennya. Kontak politik ini merupakan hubungan di antara berbagai pikiran yang hidup di tengah masyarakat. Kontak politik antara wakil dan konstituennya ini biasanya memperlihatkan bentuk-bentuk tertentu pula. Dalam melakukan komunikasi politik dengan konstituennya, anggota DPRD menjalankannya dengan cara yang berbeda-beda, sebagaimana dijelaskan oleh Kent Mukti ali selaku Camat Patampanua :

“sejauh ini anggota DPRD telah beberapakali mengunjungi wilayah kami. Dan masing-masing memiliki metode tersendiri dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Salah satunya ada yang melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat. Meskipun

tidak semua mereka datang dan menemui, tentunya hanya simpul tokoh-tokoh masyarakat. Karena mereka merasa para tokoh masyarakat yang mewakili secara kolektif semua kondisi masyarakat disana, ini yang akan menyampaikan apa-apa yang merasa selama ini kurang dalam persoalan-persoalan percepatan pembangunan maupun pelayanan publik, selain mereka datang ke masyarakat anggota DPRD juga mendatangi pejabat setempat menyampaikan bahwa inilah yang harus dibenahi sehingga terjadilah sinergitas antara anggota DPRD dengan pejabat setempat dalam rangka perumusan hasil audien mereka dengan masyarakat setempat.” (wawancara dengan informan KMA, tanggal 31 maret 2016)

Senada dengan apa yang dijelaskan wawancara diatas, Andi Ilham selaku

Lurah Tonyamang mengatakan :

“terkhusus di daerah kami di kelurahan tonyamang, anggota dewan pernah memanggil atau mengundang beberapa masyarakat yang dianggap sebagai tokoh di daerah kami ini untuk hadir di rumah anggota dewan tersebut dalam rangka membangun dialog-dialog yang mengarah pada kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada masyarakat” (wawancara dengan informan RYP, tanggal 30 maret 2016)

Dari hasil wawancara di atas peneliti menemukan bahwa komunikasi yang dibangun oleh anggota dewan juga dilakukan dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat untuk melakukan dialog interaktif dalam rangka mengetahui permasalahan serta kebutuhan dasar yang akan dijadikan acuan untuk mensejahterakan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Pinrang juga dibangun dengan menggunakan cara tatap muka langsung dengan masyarakat seperti yang kemukakan oleh kepala desa Leppangan mengatakan:

“pada periode 2014-2019 kami dari kecamatan Patampanua khususnya telah meloloskan 2 anggota dewan dari daerah kami ini. Dan keduanya ini sangat sering turun langsung ke masyarakat. Seperti pada saat hari sabtu dan minggu digunakan sebagai waktu

berkumpul untuk bercerita lepas dengan beberapa masyarakat. Selain itu ketika ada acara pernikahan di daerah kami, kedua anggota dewan ini pasti selalu hadir dan sebisa-bisa melakukan pendekatan emosional terhadap masyarakat disela-sela acara.” (wawancara dengan AP, tanggal 31 maret 2016)

Senada dengan yang di sampaikan di atas, anggota DPRD kabupaten

Pinrang dari Partai Gerindra mengatakan:

“saya pribadi sebagai anggota dewan yang mempunyai kewajiban sebagai wakil rakyat tentunya harus menjaga hubungan dengan masyarakat, sebisa mungkin harus selalu hadir dalam setiap acara-acara yang di adakan oleh masyarakat, tidak menutup kemungkinan itu sekalipun acara pernikahan maupun hajatan, saya selalu sempat hadir di acara-acara tersebut bahkan meskipun itu acara orang atau masyarakat yang bukan merupakan pendukung saya pada pemilihan legislatif kemarin karena tetap mereka adalah masyarakat yang saya wakili di DPRD” (wawancara dengan KM, tanggal 2 april 2016)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menemukan bahwa komunikasi yang dibangun oleh anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten Pinrang kepada konstituennya itu tidak hanya dilakukan di dengan cara formal tetapi juga bisa dilakukan dengan keadaan yang tidak formal seperti acara pernikahan ataupun hajatan dengan melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Senada dengan hasil wawancara di atas, salah satu tokoh masyarakat mengatakan :

“hubungan kami di masyarakat dengan anggota dewan selama ini kami anggap terbilang baik karena pertemuan-pertemuan yang kami lakukan itu tidak memandang tempat, baik itu di kantor DPRD, kantor kecamatan, ataupun di acara pernikahan sekalipun ketika kami bertemu kami tetap selalu menyempatkan melakukan dialog-dialog yang mengarah pada kebutuhan-kebutuhan kami di masyarakat” (hasil wawancara dengan DS, tanggal 2 april 2016)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dialog dan tatap muka merupakan bentuk komunikasi politik interpersonal yang juga kadang digunakan oleh anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat, komunikasi ini merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu atau satu kepada banyak. Bentuk ini terjadi ketika anggota DPRD datang untuk melakukan pertemuan dengan konstituennya baik dalam bentuk yang tidak formal sekalipun. Dialog dan tatap muka adalah cara yang efektif dalam mengetahui secara langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat karena tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dalam pertemuan dengan masyarakat akan terungkap apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Sudah seharusnya dalam pelaksanaan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang relevan diadakan dengan terbuka. Artinya pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi dipertemukan untuk bersama menyampaikan kepentingan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abbas Paduai selaku kepala desa Leppang mengatakan:

“sejauh ini komunikasi dari anggota dewan termasuk bagus, karena segala kegiatan yang dibuat dihadiri. Seperti musrembang desa misalnya. Dalam musrembang ini sering dicapai sebuah kebijakan dari aspirasi masyarakat ketika melakukan komunikasi. Dan pertukaran informasi yang berkenaan dengan apa-apa saja yang menjadi permasalahan pada masyarakat dan juga permasalahan yang ada pada pemerintahan daerah. Oleh karena itu sangat diperlukan diadakannya komunikasi sehingga jelas di dalam menjaring aspirasi masyarakat” (wawancara dengan informan AP, 31 maret 2016).

Berbanding lurus dengan hasil wawancara diatas , anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa Mansur,SE mengatakan :

“dalam setiap kegiatan musrembang, saya sebisa mungkin menghadiri kegiatan tersebut. Karena didalam musrembang kita berbicara tentang bagaimana proyek-proyek pembangunan desa atau dapil saya kedepannya. Beda halnya dengan reses, pada tahun 2015 saya sempat mengadakan reses dikecamatan. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ada di kecamatan patampanua. Dalam pertemuan tersebut kami meminta masukan dari masyarakat mengenai apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karena hal tersebut yang akan kami bawa pada saat musrembang, selain itu ada yang dikatakan RPJM-DES, jika hal tersebut tertuang di RPJM-DES maka dapat menjadi acuan pada saat musrembang desa, kecamatan, dan kabupaten” (wawancara dengan informan MS, 29 maret 2016)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan konstituennya seperti musyawarah rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, kelurahan, ataupun kecamatan setempat maka anggota DPRD dapat melakukan dialog secara langsung dengan msyarakat. Pada kegiatan ini anggota dewan perwakilan daerah kabupaten pinrang diundang oleh pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan musrembang tersebut bertujuan untuk mengetahui rencana-rencana pembangunan yang akan dilakukan di kecamatan Patampanua. Senada dengan hasil wawancara diatas, Kent Mukti Ali selaku camat Patampanua mengatakan:

“Dalam pelaksanaan musrembang yang kami adakan di tingkat kecamatan, sering kali kami mengundang salah satu anggota DPRD dapil kecamatan Patampanua untuk turut serta hadir mendengarkan dan melihat apa-apa yang akan menjadi rencana pembangunan kita di kecamatan ini, dan kebetulan ada dua orang anggota DPRD yang berasal dari kecamatan patampanua jadi kami khususkan untuk mengundang kedua anggota dewan tersebut untuk ikut serta dalam pelaksanaan musrenbang ini” (wawancara dengan KMA, tanggal 31 maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menemukan bahwa pemerintah kecamatan juga memiliki partisipasi dalam mendukung terjalannya

komunikasi antara anggota DPRD dengan konstituennya, pihak pemerintah kecamatan memfasilitasi anggota dewan dan konstituen untuk bertemu dalam kegiatan tahunan tersebut. Anggota dewan mendengarkan dan melihat langsung rencana-rencana pembangunan yang akan dilakukan di kecamatan Patampanua mendatang.

2. Komunikasi Organisasi

Selain melakukan dialog dan tatap muka dengan konstituennya, anggota dewan dalam membangun komunikasi juga melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan ke lapangan. Apa yang disampaikan masyarakat ketika melakukan dialog dengan anggota dewan ditindak lanjuti dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh anggota komisi II DPRD Kabupaten Pinrang dari fraksi PKB, Mansur SE :

“Salah satu metode yang kami gunakan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat yaitu melakukan kunjungan kerja seperti reses, dalam pelaksanaan reses masyarakat di undang untuk hadir dalam melakukan dialog-dialog seputar kebutuhan-kebutuhan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga kami di DPRD dapat mengetahui dan melakukan tindakan cepat dalam menangani permasalahan serta kebutuhan tersebut” (wawancara dengan MS, tanggal 31 maret 2016)

Senada dengan hasil wawancara diatas, salah satu anggota DPRD kabupaten Pinrang fraksi Gerindra menambahkan bahwa :

“ ketika tiba masa reses atau dengan kata lain kunjungan kerja kami langsung ke daerah pemilihan masing-masing dengan tujuan untuk bertemu dengan konstituennya dan juga bertemu dengan kader partai. Hal ini merupakan bagian dari menjaring aspirasi dari masyarakat. Masyarakat biasanya sangat antusias dengan

dibukanya forum-forum penyampaian aspirasi langsung macam ini. Karena mereka dapat berdialog secara terbuka dengan anggota dewan yang telah mereka pilih kemarin.” (wawancara dengan informan KM, tanggal 2 april 2016)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menemukan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat mempunyai fungsi: memilih dan menyeleksi, pengendalian dan pengawasan, pembuatan peraturan daerah, debat dan fungsi representasi serta mempunyai hak-hak: anggaran, mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, meminta keterangan, mengadakan perubahan, mengajukan pernyataan pendapat serta hak prakarsa juga dapat membangun komunikasi dengan masyarakat yang di atur oleh undang-undang dan perda berupa reses yang dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu anggota dewan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada peneliti saat wawancara :

“reses adalah momen bagi kami anggota DPRD Kabupaten Pinrang untuk melakukan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing guna menjangir aspirasi masyarakat. Reses adalah kegiatan formal yang diatur oleh UU dan Tata Tertib, yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara kelompok” (wawancara dengan informan MS, tanggal 29 maret 2016).

Dalam melakukan komunikasi seperti reses terkadang anggota dewan mendapatkan kritikan yang ditujukan kepada mereka karena dinilai tidak tanggap dengan aspirasi masyarakat. Rakyat mengkritik anggota dewan secara langsung dengan harapan agar anggota dewan mau bertanggungjawab dengan rakyat. Ketika anggota dewan melakukan kunjungan ke lapangan,hal tersebut merupakan momen yang tepat bagi rakyat untuk melakukan kritik secara langsung. Dengan

melakukan kunjungan ke lapangan juga akan menambah bahan pertimbangan bagi anggota dewan dalam menentukan arah kebijaksanaan kebijakan daerah. Anggota dewan dapat melihat secara langsung apa yang terjadi di tengah masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat :

“Ketika para anggota dewan melakukan reses dan bertemu langsung dengan kami di masyarakat, terkadang mereka mendapatkan sambutan yang hangat dari masyarakat. Namun banyak juga masyarakat yang melakukan kritik terhadap anggota dewan saat dibukanya forum-forum dialog interaktif seperti itu. Seperti halnya ada masyarakat yang sering mempertanyakan kinerja dari anggota dewan, ada juga tanggapan mengenai lambatnya pembangunan di daerah mereka masing-masing. Sangat variatif pokoknya tanggapan dari masyarakat.” (wawancara dengan informan SR, tanggal 2 april 2016)

Dari wawancara diatas peneliti menemukan bahwa anggapan rakyat peka terhadap pemerintahan tentu didasari pada keyakinan bahwa rakyat memperhatikan dan memonitor hasil kerja yang ditunjukkan oleh anggota dewan. Adanya kemampuan rakyat untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja anggota dewan secara rasional tampaknya diyakini oleh anggota DPRD Kabupaten Pinrang dari fraksi PKB, Mansur SE. Usahanya untuk membangun daerah yang diwakilinya akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini terungkap dari pernyataan beliau yang mengatakan :

“kunjungan kerja atau reses yang biasa kami lakukan di daerah pemilihan dan langsung terjun ke lapangan untuk bertemu dengan konstituen bertujuan untuk mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat selama ini. Sehingga nantinya akan menghasilkan yang sebuah kebijakan yang pro dan terbaik bagi masyarakat.”

Mansur SE juga menambahkan bahwa :

“masuk dan kritik yang disampaikan masyarakat ketika masa reses akan ditindak lanjuti ketika pelaksanaan musrenbang dan kemudian akan kami perjuangkan untuk masuk dalam APBD tahun ke depan ketika melakukan rapat kerja dengan panitia anggaran. Dengan banyaknya permintaan masyarakat ketika reses, anggota dewan dan pemerintah daerah harus pandai memilah mana yang skala prioritas untuk lebih diutamakan pelaksanaannya” (wawancara dengan informan MS, tanggal 29 maret 2016)

Hal ini memperlihatkan bahwasanya kunjungan ke lapangan sebagai bagian dari menjaring aspirasi masyarakat merupakan cara yang tepat untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Dalam kunjungan ke lapangan anggota dewan dapat melihat langsung kondisi yang dirasakan oleh masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh anggota dewan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjaring aspirasi masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan kunjungan ke lapangan. Kegiatan ini merupakan momen yang sangat penting antara anggota dewan dengan konstituennya dalam melakukan komunikasi politik. Ikatan akan menjadi lebih dekat dengan konstituennya ketika langsung menemui konstituen yang berada di daerah pemilihan masing-masing.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Politik Antara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Dengan Konstituen

Komunikasi politik antara anggota DPRD dengan konstituen adalah suatu bentuk komunikasi antara wakil rakyat (legislatif) dengan konstituen pemilih (rakyat) dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi politik rakyat dalam perumusan kebijakan publik. Dalam arti yang paling sederhana, komunikasi politik merupakan kontak antara wakil rakyat dan

konstituennya. Kontak politik ini merupakan hubungan di antara berbagai pikiran yang hidup dalam masyarakat, kontak politik antara wakil dan konstituennya ini biasanya memperlihatkan bentuk-bentuk tertentu pula. Namun dalam prosesnya terdapat berbagai faktor yang dapat menunjang alur komunikasi sampai pada tahap pencapaian tujuan dan faktor yang dapat menghambatnya.

1. Faktor Pendukung

Dalam menjaring aspirasi masyarakat ketika turun ke daerah pemilihan, anggota DPRD diharapkan dapat merealisasikan aspirasi dari masyarakat. Ada beberapa faktor yang sangat menunjang proses komunikasi bagi anggota dewan ketika turun ke daerah pemilihan untuk bertemu dengan konstituen. Seperti yang disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Pinrang dari fraksi PKB Mansur, SE :

“Penyebaran teknologi informasi sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan dan kesadaran politik masyarakat, terbukti ketika kami melakukan komunikasi, melakukan reses banyak masyarakat mengeluarkan aspirasi yang membangun. Selain itu pemahaman tentang fungsi dan peran kami anggota dewan sebagai lembaga penyalur aspirasi bisa diserap oleh masyarakat, sehingga mereka tak ragu-ragu dan antusias mengeluarkan segala permasalahan yang sedang mereka hadapi.” (wawancara dengan informan MS, tanggal 29 maret 2016)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dari permasalahan yang terjadi di masyarakat selama ini menjadikan masyarakat memberikan aspirasi yang menjadi kebutuhan mereka dan merupakan sebuah masukan-masukan yang membangun bagi anggota dewan untuk selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas utama di masyarakat selama ini. Sama halnya

yang disampaikan wawancara diatas, menurut salah satu tokoh masyarakat mengatakan :

“ kami sangat menunggu masa reses dari anggota dewan, karena kami berpikir kapan lagi kami bisa bertemu mereka ditengah-tengah kesibukan anggota dewan yang begitu padat. Toh kami biasanya melihat mereka hanya disurat kabar atau baliho-baliho ketika memasuki masa kampanye. Selain itu kapan lagi kami bisa menyuarkan keinginan kami kepada anggota dewan. Kami hanya selalu berharap dari setiap hasil pertemuan kami itu bisa segera ditindak lanjuti oleh anggota dewan” (wawancara dengan informan SRG, tanggal 2 april 2016)

Wawancara di atas menunjukkan betapa antusias masyarakat dalam membangun komunikasi dengan anggota dewan, keinginan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka secara langsung sangatlah besar dan ini dipengaruhi oleh pembelajaran yang ada dimedia-media. Selain itu kesadaran yang dibangun bersifat politis karena memperjuangkan aspirasi mereka. Sehingga komunikasi yang terjadi antara anggota dewan dan konstituen dapat berjalan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah Tonyamang terkait komunikasi politik anggota DPRD kabupaten Pinrang sebagai berikut:

“kami dari pihak kelurahan memfasilitasi masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan anggota dewan yang turun reses kemasyarakat dengan meminta beberapa tokoh masyarakat untuk hadir dalam kegiatan reses tersebut sehingga anggota DPRD kabupaten Pinrang di dapil kecamatan Patampanua khususnya di kelurahan Tonyamang melakukan komunikasi politik terbuka ke masyarakat untuk mengetahui apa yang di butuhkan masyarakat sehingga dapat bersinegi dengan program-program pemerintah dalam pembangunan daerah secara infrastrukrtur maupun supra sturktur” (hasil wawancara dengan informan AI tanggal 5 April 2016)

Sesuai dengan hasil wawancara di atas peneliti temukan dilapangan bahwa apa yang di sampaiakan diatas itu benar adanya karena berdasarkan hasil data yang

peneliti dapatkan di lapangan bahwa pihak kelurahan memfasilitasi masyarakat untuk bertemu langsung dalam hal reses DPRD, ini merupakan salah satu faktor yang mendukung terbangunnya komunikasi antara anggota dewan dengan konstituen yang dimana pemerintah juga berperan aktif mengundang masyarakat untuk hadir dalam kegiatan tersebut karena dari hasil reses tersebut nantinya akan meningkatkan taraf pembangunan yang juga sejalan dengan dengan program-program pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan di daerah kecamatan terkhusus di kelurahan Tonyamang,

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota dewan dari Partai Gerindra mengemukakan bahwa:

“dari beberapa pertemuan-pertemuan dengan masyarakat pemilih di daerah pemilihan kami tentunya telah di atur oleh UU ataupun peraturan daerah seperti halnya reses, kegiatan reses ini kami laksanakan tiga kali dalam satu tahun, dari kegiatan reses seperti ini kamu selaku wakil rakyat dengan intens mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, permasalahan-permasalahan masyarakat, apa yang harusnya dibangun, apa yang mesti diperbaiki semua tertuang dalam pertemuan tersebut” (wawancara dengan KM, tanggal 2 april 2016)

Dari hasil wawancara di atas peneliti menemukan bahwa dengan kegiatan kunjungan kerja atau reses yang dilakukan anggota dewan dengan konstituennya telah diatur oleh perda maupun UU, ini merupakan salah satu faktor yang mendukung terjalinnya komunikasi antara anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Pinrang dengan konstituen pemilihnya yang sebanyak tiga kali selama kurang waktu satu tahun dapat mengunjungi dan bertemu langsung mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat, dari kunjungan tersebut tentunya

anggota dewan dapat menampung segala bentuk aspirasi dari masyarakat di kecamatan Patampanua

2. Faktor Penghambat

Penjaringan aspirasi masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama dan secara berkelanjutan. Untuk mencapai hasil dari komunikasi politik itu tentunya juga menghadapi hambatan-hambatan dari masyarakat maupun dari anggota DPRD itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses komunikasi ketika anggota dewan turun langsung ke masyarakat seperti yang di sampaikan oleh salah satu anggota DPRD kabupaten Pinrang dari Partai Gerindra :

“kami selaku anggota DPRD sangat menginginkan bertemu langsung dengan masyarakat yang ada di dapil kami masing-masing karena itu merupakan salah satu tugas kami sebagai wakil mereka di DPRD untuk menjangir segala bentuk aspirasi masyarakat akan tetapi itu kadang terkendala karena masih banyaknya kesibukan-kesibukan kami di dewan” (wawancara dengan informan KM, tanggal 2 april 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menemukan bahwa salah satu faktor penghambat dari komunikasi yang ingin dibangun oleh anggota dewan yaitu adanya kesibukan yang dimiliki anggota dewan tiap-tiap fraksi seperti menghadiri pertemuan-pertemuan penting maupun pertemuan resmi, mengikuti sidang-sidang di DPRD, melakukan kunjungan kerja di daerah lain, mengikuti kegiatan studi banding, dan juga mengikuti kegiatan dalam rangka peningkatan SDM seperti mengikuti pelatihan, seminar, dan sebagainya yang mengakibatkan sedikitnya waktu yang dimiliki oleh anggota dewan untuk bertemu dengan

masyarakat atau konstituen pemilihnya, senada dengan penjelasan diatas camat

Patampanua juga mengatakan bahwa:

“sejauh ini yang kami ketahui antara anggota dewan dengan konstituennya masing-masing memiliki kesibukan seperti pada anggota dewan mungkin sibuk dengan pekerjaan atau tugasnya di kantor DPRD begitu juga dengan masyarakat atau konstituen pemilihnya karena seperti pada data kecamatan bahwa delapan puluh persen pekerjaan masyarakat di kecamatan Patampanua adalah berprofesi sebagai petani sehingga mereka memiliki sedikit waktu luang untuk bertemu dengan anggota dewan” (wawancara dengan KMA, tanggal 2016)

Sesuai hasil wawancara diatas peneliti menemukan dilapangan bahwa masing-masing anggota dewan dan konstituennya memiliki kesibukan tersendiri seperti pada penjelasan di atas yang mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat kecamatan Patampanua bekerja sebagai petani dan penggarap kebun yang dimana mereka ketika pagi turun ke sawah atau ke kebun itu akan kembali setelah sore tiba sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk bertemu dengan anggota dewan yang mengakibatkan tidak maksimalnya komunikasi politik antara anggota dewan dengan masyarakat dalam melakukan penjangkauan aspirasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dapil dua terkhusus pada kecamatan Patampanua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di kecamatan Patampanua, beliau mengatakan bahwa:

“kami selaku masyarakat sangat senang ketika anggota dewan berkunjung ke desa kami karena tentunya dari kunjungan mereka akan melalukan pertemuan terbuka dengan kami di masyarakat yang akan menghasilkan suatu kesepakatan yang mengarah pada pembangunan akan tetapi semua itu bisa terwujud ketika kami di masyarakat sedikit proaktif untuk mengundang anggota dewan di dapil kami untuk berkunjung mendengarkan langsung apa-apa yang

menjadi kebutuhan kami di masyarakat” (wawancara dengan HS, tanggal 3 april 2016)

Sesuai hasil wawancara diatas peneliti menemukan di lapangan bahwa salah satu penghambat dalam membangun komunikasi politik antara anggota dewan dengan konstituennya yaitu dimana masyarakat dituntut untuk proaktif dalam rangka mengundang anggota dewan untuk hadir langsung meninjau serta bertemu dengan masyarakat pemilihnya dalam rangka untuk mengetahui apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk dijadikan skala prioritas dalam upaya percepatan pembangunan daerah itu dikarenakan sibuknya atau padatnya kegiatan anggota dewan itu sendiri.

Berbeda halnya wawancara dengan Mansur,SE selaku anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten Pinrang dari Partai Kebangkitan Bangsa yang mengatakan bahwa:

“dari bentuk kegiatan pertemuan kami dengan masyarakat seperti reses itu sangat kami dukung dan apresiasi karena merupakan salah satu wadah pertemuan kami dengan masyarakat, akan tetapi pertemuan-pertemuan seperti ini masih terbilang kurang karena kami hanya bisa melaksanakan reses seperti ini tiga kali dalam kurung waktu satu tahun dengan daerah pemilihan mencakup tiga kecamatan dengan berbagai variatif kebutuhan masyarakat yang tentunya membutuhkan waktu yang banyak untuk menampung berbagai aspirasi tersebut sehingga kami merasa bahwa pertemuan seperti ini masih sangat kurang efektif untuk mengawal setiap kebutuhan-kebutuhan di masyarakat.” (wawancara dengan MS, tanggal 31 maret 2016)

Sesuai hasil wawancara diatas peneliti menemukan bahwa dari bentuk komunikasi anggota dewan dengan masyarakat seperti reses yang dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun masih terbilang kurang efektif karena pertemuan antara anggota dewan dengan masyarakat dalam forum formal masih kurang sehingga

kadang penjaringan aspirasi masyarakat tidak efektif hal tersebut menyebabkan adanya pembatasan pertemuan yang mengakibatkan tidak maksimalnya komunikasi antara anggota dewan dengan konstituen.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hubungan antara anggota DPRD dan konstituen merupakan isu penting dalam sistem demokrasi perwakilan. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat dapat dikatakan efektif apabila lembaga ini mampu merefleksikan kepentingan konstituennya dalam setiap proses pengambilan keputusan. Tanggungjawab DPRD sebagai wakil rakyat di daerah mengharuskan mereka untuk membangun komunikasi secara intensif dengan konstituennya untuk mengetahui berbagai isu maupun permasalahan yang terjadi pada konstituen adapun beberapa hal kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal, bentuk komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang paling sering atau dominan digunakan oleh para anggota dewan ketika sedang berhadapan dengan para konstituen pemilihnya, kegiatan komunikasi interpersonal yang sering digunakan anggota DPRD meliputi kegiatan tatap muka/*face to face* dan dialog interaktif. Dengan metode komunikasi yang tidak formal seperti ini antara anggota dewan dengan konstituen tidak dibatasi oleh jarak dan waktu sehingga mereka tidak saling canggung untuk bertukar pikiran dalam merumuskan segala bentuk kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

2. Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi, komunikasi seperti ini biasa digunakan oleh anggota DPRD kabupaten Pinrang kepada masyarakat pemilihnya dalam menjangkau aspirasi serta mengetahui permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat, komunikasi organisasi yang dilakukan anggota DPRD kabupaten Pinrang meliputi kegiatan Reses dan Penyuluhan. Dari bentuk kegiatan seperti ini anggota dewan dapat menjangkau aspirasi masyarakat secara lembaga yang telah ditentukan waktu pelaksanaannya sehingga segala bentuk aspirasi masyarakat dapat tertampung dan direalisasikan dengan cepat

3. Faktor Penghambat dan Pendukung

Dalam pelaksanaan komunikasi anggota dewan dengan konstituennya tentu di tunjang oleh beberapa faktor yang mendukung seperti besarnya antusias masyarakat untuk bertemu dengan anggota dewan dan pertemuan-pertemuan untuk membangun komunikasi itu telah diatur oleh UU maupun peraturan daerah sehingga secara berkala aspirasi masyarakat dapat tersalurkan. Sedangkan dalam pelaksanaan juga menemukan beberapa hambatan seperti kedua belah pihak yang memiliki kesibukan masing-masing dan dari peraturan kunjungan yang dilaksanakan anggota sebanyak tiga kali dalam satu tahun masih terbilang kurang sehingga komunikasi yang dilakukan tidak maksimal.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan, ada beberapa pokok pikiran yang dapat diajukan sebagai saran-saran dari hasil penelitian ini. Ada beberapa pokok dari sebuah inisiatif untuk meningkatkan hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat pemilih, yaitu :

- 1). Harusnya ada ruang publik sebagai wadah komunikasi antara masyarakat dan anggota DPRD kabupaten pinrang sehingga terjadinya komunikasi yang efektif baik dari masyarakat maupun anggota dewan.
- 2). Masyarakat juga harus proaktif terhadap anggota DPRD apa bila kegiatan untuk membangun komunikasi seperti reses dilaksanakan di daerah pemilihan kecamatan Patampanua atau DAPIL masing-masing.
- 3). Anggota DPRD harus betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di kabupaten pinrang khususnya kecamatan Patampanua, atau di daerah pemilihan masing-masing sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar, 2011. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- , 2014. *Politik Pencitraan - Pencitraan Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- A.W. Widjaja, 1993. *Komunikasi : Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : Bumi Aksara
- Budiarjo Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Hartley, John, 2010. *Communication, Culture, and Media Studies: Konsep Kunci*. Yogyakarta : Jalasutra Anggota IKAPI.
- Hasan, Erlina, 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya
- Nimmo, Dan, 2004. *Komunikasi Politik* (komunikator, pesan, dan media), Bandung :PT.Remaja Rosdakarya.
- Rauf, Maswadi, dan Mappa Nasrun, 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sastroadmodjo, Sudijono, 1995. *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Saeful Muhtadi, Asep, 2008. *Komunikasi Politik Indonesia*. Bandung :PT.Remaja Rosdakarya.
- Syafiie, Inu Kencana, 2014. *Proses Legislatif*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sugiono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Wasistiono,sadu, dan Yonatan Wiyoso, 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung : FOKUSMEDIA (Anggota IKAPI).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

